DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiroedin Sjarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Arbi Sanit. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992.

_____, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Bambang Yodoyono. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*, Ctk. Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2001.

Bastian Tafal. *Pokok-Pokok Tata Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Inu Kencana Syafiie, dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Ctk. Pertama, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 1999

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.

_____, *Ilmu Perundang-Undangan*, Ctk. Ketujuh, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Max Boboy. *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Miriam Budihardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Yudisial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika)*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

_____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Saifudin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soenobo Wirjosoegito. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

Solly Lubis. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung, 1983.

Toto Pandoyo. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Masa Sidang II Tahun 2011 Tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Nota Penjelasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Umum.

Websites

"*Pemerintah Batalkan 824 Perda Bermasalah Dianggap Bertentangan Dengan Undang-Undang*" terdapat dalam http://www.rmol.co/read/2012/08/28/75971/Pemerintah-Batalkan-824-Perda-Bermasalah-. Selasa, 28 Agustus 2012 , 08:24 WIB

Data Wawancara

Sumber wawancara dengan Bapak Nanang, selaku Kasubag Rapat dan Risalah, DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 2012.

Sumber wawancara dengan Bapak. R Bagus Sumbarja, selaku Ketua Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 2012.

Sumber wawancara dengan Bapak. Rahmat, selaku Staff Perancang Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 2012.